

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Muhammad Abdukadir, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung: Citra Aditya

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Jakarta: Rajawali Pers.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018).

V. Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014).

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2004, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, (Jakarta : Prenada Media, 2011).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Bagir Manan, Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI Nomor 244*, Maret, IKAHI, Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Dahlan Thaib. DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 2002.

Firmansyah Arifin, ad. al. 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, cet. 1, Jakarta, KRHN.

Djarwanto PS, 1996 Pokok – Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Yogyakarta : Liberti

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2003).

Murtir Jeddawi. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Howland, Robert H. 2008. How Are Drugs Approved? Part 1: The Evolution of the Food and Drug Administration. *Journal of Psychosocial Nursing*. Vol. 46, No.1

Kishore, Raj dan Edward Tabor. 2010. Overview of the FDA Amendments Act of 2007: Its Effect on the Drug Development Landscape. *Drug Information Journal*. Vol. 44

Agus Widodo, 2010, *Cerdas Memilih Obat dan Mengenali Penyakit*, Jakarta: PT. Lingkar Pena Kreatif.

Rio Rahardjo (Ed), 2009, *Kumpulan Kuliah Farmakologi*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

B. Dzulkarnain dan N. Sukasediati, 1992, *Pemanfaatan Obat Tradisional Dapat Dipercepat?*, *Media Litbangkes* Vol. II/No. 03/1992, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004)

Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditiya Bakti

Hermansyah, M., Pratikno., Soenoko, R., dan Setyanto, N.W., 2013. Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP) Produksi Maltosa Dengan Pendekatan Good Manufacturing Practice (GMP). *Jenis*. Vol.1(1): 14-20

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Kementerian

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan

Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.23.01.11.04105 tanggal 6 Mei
2011 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan POM RI No.
HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari
2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan
Makanan Ilegal

Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.23.09.11.07609 tanggal 5 September 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

C. Jurnal dan Artikel

Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2006.

Henny Sulistiawati “*Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan di Samarinda*”, eJournal Ilmu Pemerintahan Unimul, Volume 6, Nomor 1, 2018

Suprayogi, STP.,MP.,PhD., Modul Pelatihan GMP, Program Pengabdian Masyarakat BPPM, Malang, Universitas Brawijaya

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

Nanizar Zaman Joenoes, 2001, *ARS Prescribendi (Resep yang Rasional)*, Surabaya: Airlangga University Press.

M, Anief, 2005, *Farmasetika*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

D. Internet

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2021). Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021. Diakses pada 1 Desember 2022

https://www.pom.go.id/new/techno/dat/20211203/Laporan_Survei_Kepuasan_Masyarakat_Badan_POM_Tahun_2021.pdf

Ulya, F.N. 24 November 2022. “*Kemenkes : Masih Ada 11 Pasien Gagal Ginjal Dirawat, 9 di Antaranya di RSCM*”. Kompas.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/16173601/kemenkes-masih-ada-11-pasien-gagal-ginjal-dirawat-9-di-antaranya-di-rscm>